



LKJIP 2024

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BLITAR**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar

Telp. 0342802499 Fax.0342805271

Email:inspektorat@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut "*good governance*" dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku lepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi

Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi APIP untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan- permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terhadap pedoman Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, 26 Februari 2025
Inspektor Daerah Kota Blitar

RATIH DEWI INDARTI SE, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760225 200501 2009

IKHTISAR EKSEKUTIF*(Executive Summary)*

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai organisasi yang menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki fungsi sebagai Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Kota Blitar.

Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Untuk mewujudkan visi “***Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat***” dimana Inspektorat Daerah Kota Blitar selaku organisasi yang membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan Misi ke 5 yaitu “***Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih berbasis Teknologi Informasi***”.

Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%
		Nilai Maturitas SPIP	3,332 (Nilai)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)

Sebagai gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2024 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%	85,00%	102,41%
		Nilai Maturitas SPIP	3,332 (Nilai)	3,026	90,82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	A (86,69)	100%

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 10.400.348.656,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang dialokasikan untuk 3 Program.

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.648.963.756,00	Rp 7.512.680.098,00	98,22%
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2.027.234.200,00	Rp 1.945.832.569,00	95,98%
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 724.150.700,00	Rp 709.889.649,00	98,03%
JUMLAH	Rp 10.400.348.656,00	Rp 10.168.402.316,00	97,77%

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran /Kinerja Utama/Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	102,41%	95,98%	1,00
	Nilai Maturitas SPIP	90,81%		
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	98,03%	1,02
Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	98,22%	1,02

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Bagan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Dasar Hukum	10
1.5 Aspek-aspek Strategis	13
1.6 Isu-isu Strategis	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	16
2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan (<i>Cost per Outcome</i>)	37
3.3 Prestasi / Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Langkah Perbaikan	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	20
Tabel 2.3	Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar	21
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024	33
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra	35
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	35
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar	36
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2024	37
Tabel 3.7	Realisasi per Sasaran Pembangunan	40
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran per Program	41
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	42
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar	8
-------------------	--	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Data Pegawai Inspektorat	9
Bagan 2.1	Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD	17
Bagan 2.2	Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar	19
Bagan 3.1	Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Bagan 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024	30

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara

periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

- revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Adapun fungsi Sekretariat:

- 1. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
 4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
 9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
 10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
 13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
 14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rata dinas;
 15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 16. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 17. Fasilitasi pelaksanaan pemebelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 18. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

19. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 20. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;
 21. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 22. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
 23. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
 24. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 25. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
 27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan kinerja;
 - Pengawasan keuangan;
 - Pengawasan tugas pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
 - 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - 5) Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada

wilayah I;

- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan Kinerja;
 - Pengawasan Keuangan;
 - Pengawasan Tugas Pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

5. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain:
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan

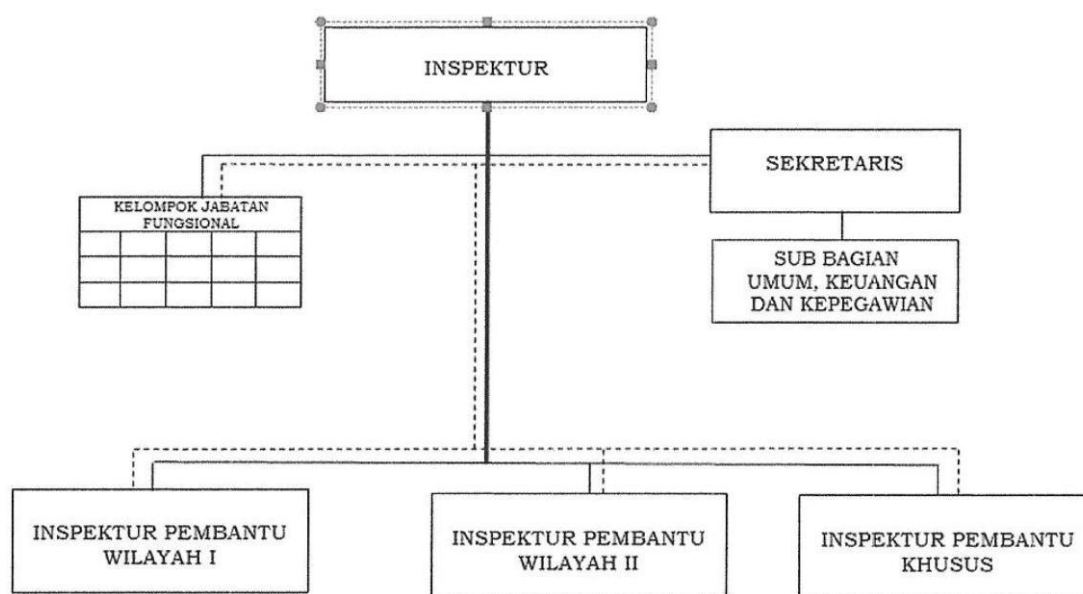
- Pengawasan kinerja
 - Pengawasan keuangan
 - Pengawasan tugas pembantuan; dan
 - Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi;
- 4) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - 5) Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
 - 6) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
 - evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - evaluasi system pengendalian internal;
 - pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
 - penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
 - pengawasan area reformasi birokrasi lainnya.
 - 7) Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian Negara;
 - 8) Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi:
 - Evaluasi terhadap pelaporan Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
 - 10) Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
 - 11) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar



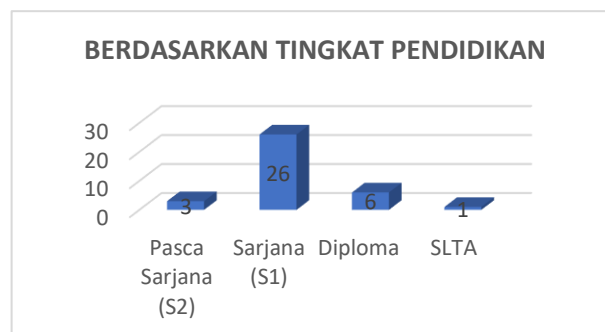
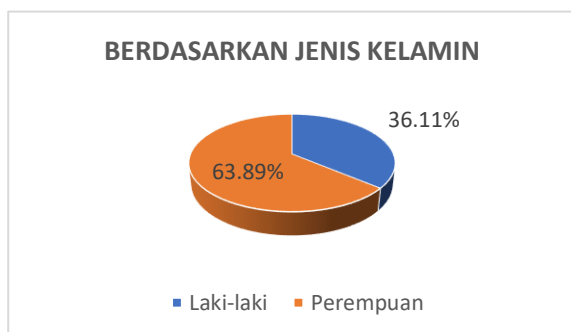
Nama pejabat pada tahun 2024:

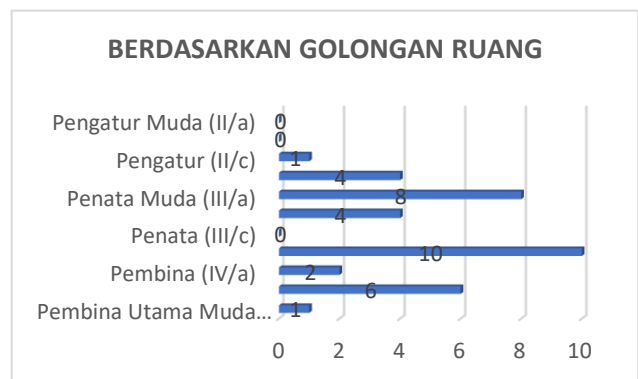
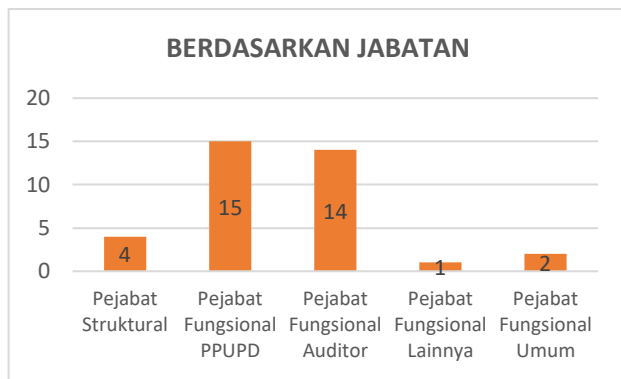
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Inspektur | : Ratih Dewi Indarti , SE., CGCAE |
| 2. Sekretaris | : Tonny Hermawanto, ST., MT., CGCAE |
| 3. Plt. Inpektur Pembantu Wilayah I | : Enny Istirom, SP |
| 4. Inpektur Pembantu Wilayah II | : Siswahono, ST |
| 5. Inpektur Pembantu Khusus | : Taufiq Rachman Hakim, S.Sos, MM |
| 6. Kasubag UKK | : Umi Maspupah S.Sos |

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	3	3	6
3	Pembina (IV/a)	1	1	2
4	Penata Tk.I (III/d)	4	6	10
5	Penata (III/c)	0	0	0
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	3	4
7	Penata Muda (III/a)	3	5	8
8	Pengatur Tk.I (II/d)	1	3	4
9	Pengatur (II/c)	0	1	1
10	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	0	0
11	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
JUMLAH		13	23	36
TINGKAT PENDIDIKAN				
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3
2	Sarjana (S1)	9	17	26
3	Diploma	1	5	6
4	SLTA	1	0	1
JUMLAH		13	23	36
JABATAN				
1	Pejabat Struktural	2	2	4
2	Pejabat Fungsional PPUPD	4	11	15
3	Pejabat Fungsional Auditor	5	9	14
4	Pejabat Fungsional Lainnya	0	1	1
5	Pejabat Fungsional Umum	2	0	2
JUMLAH		13	23	36
STATUS KEPEGAWAIAN				
1	PNS	13	23	36
2	CPNS	0	0	0
JUMLAH		13	23	36

Bagan 1.1
Data Pegawai Inspektorat





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024, dengan tujuan:

- Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
 - 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 - 13) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 - 14) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 15) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
- 17) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 18) Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 19) Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- 20) Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
- 21) Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 22) Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
- 23) Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
- 24) Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 25) Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 26) Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 27) Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 28) Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 29) Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

- 30) Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 31) Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
- 32) Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
- 33) Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

1.5 Aspek-aspek Strategis

Inspektorat Daerah Kota Blitar mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Belum semua Auditor dan PPUPD dapat melaksanakan pelatihan berkelanjutan minimal 120 JP per tahun karena padatnya jadwal Mandatory yang dilaksanakan oleh Inspektorat

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan pelaksanaan

pengawasan.

- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP Eksternal lainnya serta dengan APH.

b. Kendala

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal

1.6 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

- 1) Pemenuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- 2) Pengembangan sistem, prosedur dan kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan
- 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 4) Pembangunan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi
- 5) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

BAB II

PERENCANAAN &

PERJANJIAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021- 2026 adalah : ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”***. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Langkah-langkah rencana strategis yang untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota

Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Bagan 2.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD

Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD	
RPJMD TAHUN 2021-2026	RENSTRA TAHUN 2021-2026
VISI Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT	TUJUAN: 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Indikator : 1) Opini BPK atas LKPD 2) Nilai SAKIP 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
MISI 5 Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	SASARAN: 1. Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS TEKNOLOGI	
SASARAN : 1. Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja: 1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti 2. Nilai Maturitas SPIP 3. Persentase Perangkat Daerah dengan kategori Nilai SAKIP minimal memuaskan (A) 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	PROGRAM: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan Perangkat Daerah dengan menetapkan

Visi, Misi, dan Program Kerja yang akan dipedomi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Inspektorat Daerah Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

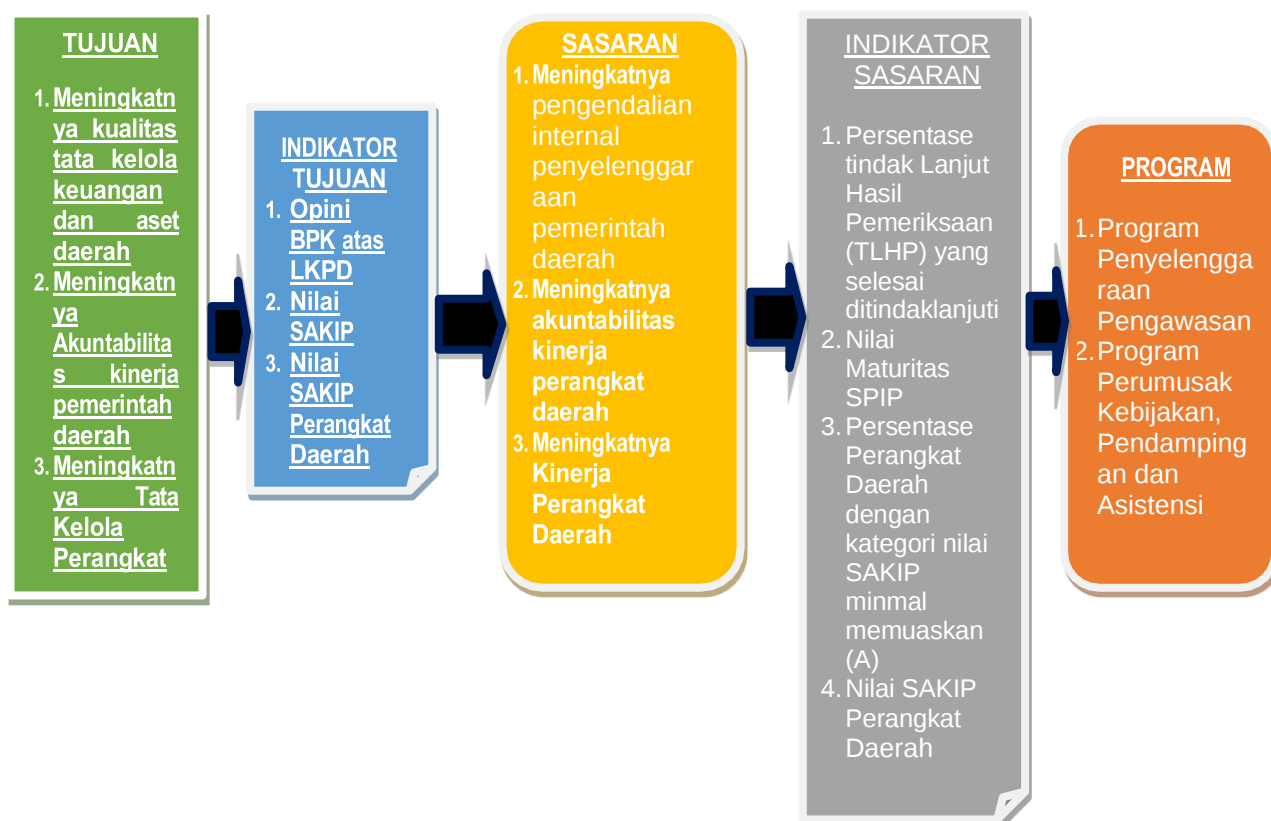
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
			Penguatan sistem pengendalian internal
			Peningkatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja
			Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta

			lingkungan kerja yang kondusif
--	--	--	--------------------------------

Berikut adalah Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026:

Bagan 2.2
Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar



2.2 Perjanjian Kinerja

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%
		Nilai Maturitas SPIP	3,332 (Nilai)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)

Program		Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.648.963.756,00	DAU
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2.027.234.200,00	DAU
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 724.150.700,00	DAU
JUMLAH		Rp 10.400.348.656,00	

Tabel 2.3
Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Sekretaris	1. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2. Ikhtisar Hasil Pengawasan
		Nilai Maturitas SPIP	Laporan Hasil Quality Assurance (QE) yang dikeluarkan oleh BPKP		Laporan Hasil QE oleh BPKP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%	Irban 1,2 dan Irban Khusus	LHE SAKIP oleh Inspektorat
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Sekretaris	LHE SAKIP oleh Inspektorat

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Inspektur dengan Walikota Blitar, 2) Perjanjian kinerja antara Eselon III dan Pejabat Fungsional dengan Inspektur, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon 4 dengan Eselon III dan 4) Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014). Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan

terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan realisasi Kinerja Dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indicator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan serratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

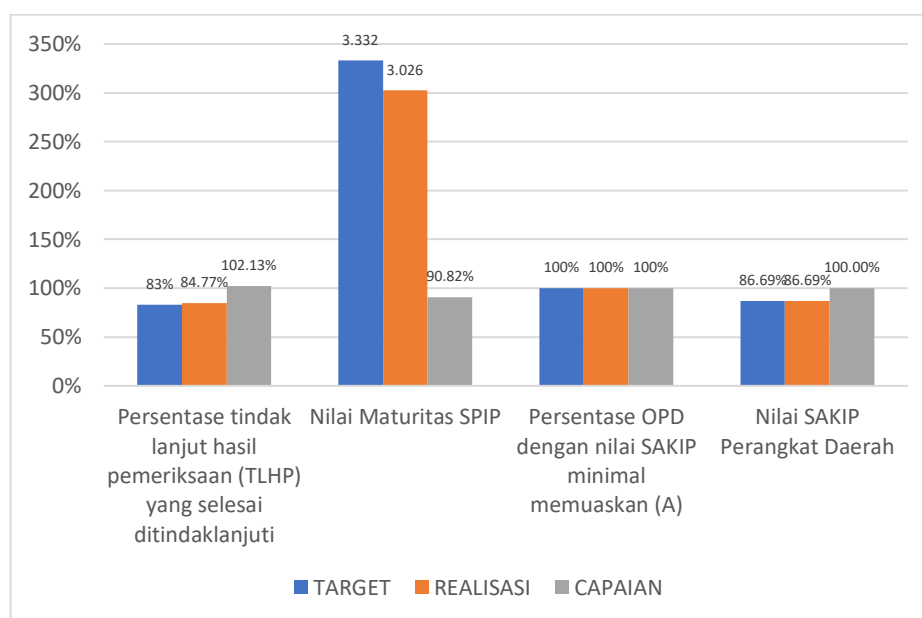
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penangannan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2024 merupakan analisis terhadap Komitmen Inspektorat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%	85,00%	102,41%
		Nilai Maturitas SPIP	3,332 (Nilai)	3,026	90,82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	A (86,69)	100%

Bagan 3.1
Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2024 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah;

Indikator:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (83,00%) dengan realisasi 84,77%% menghasilkan capaian 102,13%%. Dari 832 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005 sampai dengan 2024) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 766 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2024) dari 4.468 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 3.727 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 102,13% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Salah satu faktor pendorong tercapainya indikator ini yaitu adanya kegiatan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui aplikasi SI-PATRIAWAS, sehingga proses penyelesaian Tindak Lanjut oleh OPD menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga dengan diadakannya Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP setiap semester yang diadakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar yang mempermudah OPD dalam hal pemutakhiran data dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

Faktor Penghambat:

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Selain itu terdapat beberapa OPD yang sering terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga proses penyelesaian tindak lanjut memerlukan waktu yang lebih lama.

Tindak Lanjut:

Untuk ke depannya akan terus memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

Nilai Maturitas SPIP.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,332 dengan realisasi sebesar 3,026 menghasilkan capaian sebesar 90,82%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Faktor Pendorong:

Perencanaan dan pencapaian tujuan organisasi sudah terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah serta manajemen resiko telah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Faktor Penghambat:

Aplikasi SPIP terintegrasi (E-Integrity) dari BPKP yang belum optimal sehingga menyulitkan proses Evaluasi Maturitas SPIP; manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Tindak Lanjut:

Berkoordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity serta mengoptimalkan pemantauan secara berkala penyelenggaraan manajemen risiko.

Sasaran 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Indikator:

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari

Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat yang berkesinambungan. Selain itu dengan adanya Aplikasi SI-VAKIP mempermudah tim evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dikarenakan dengan adanya aplikasi ini proses evaluasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif.

Faktor Penghambat:

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Tindak Lanjut:

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antar Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bappeda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

Sasaran 3:

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator:

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (86,69) dengan realisasi A (86,69) menghasilkan capaian 100%. Nilai tersebut sesuai

dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700.1.2.9/751/410.050/2024. Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

Faktor Penghambat:

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait penetapan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, pohon kinerja, crosscutting, dan lain sebagainya.

Tindak Lanjut:

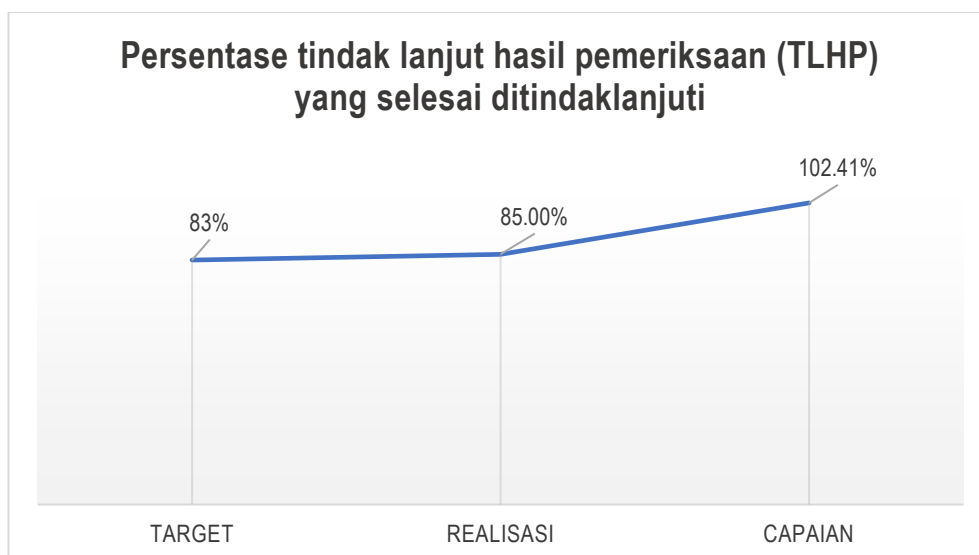
Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

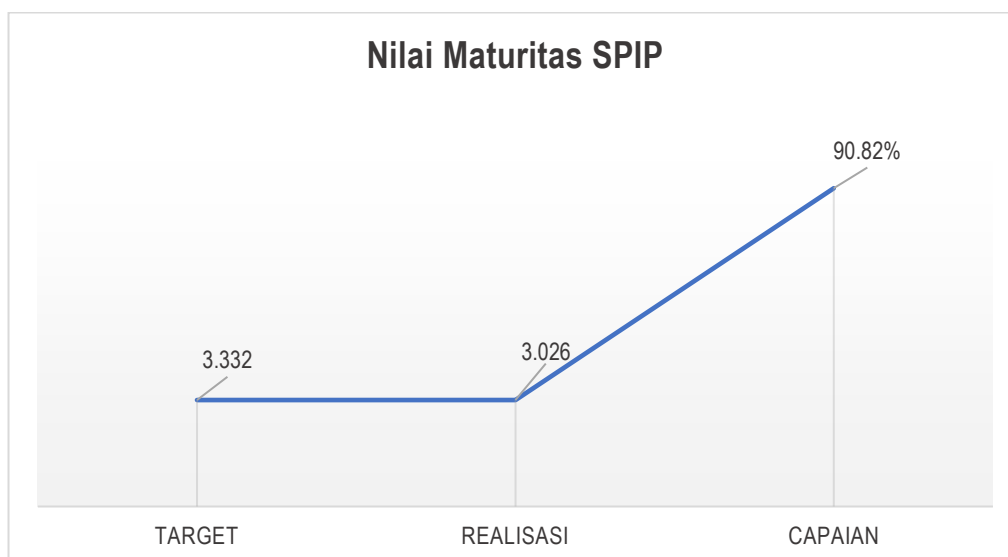
Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar 99,54% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Bagan 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024

Kinerja Utama 1:

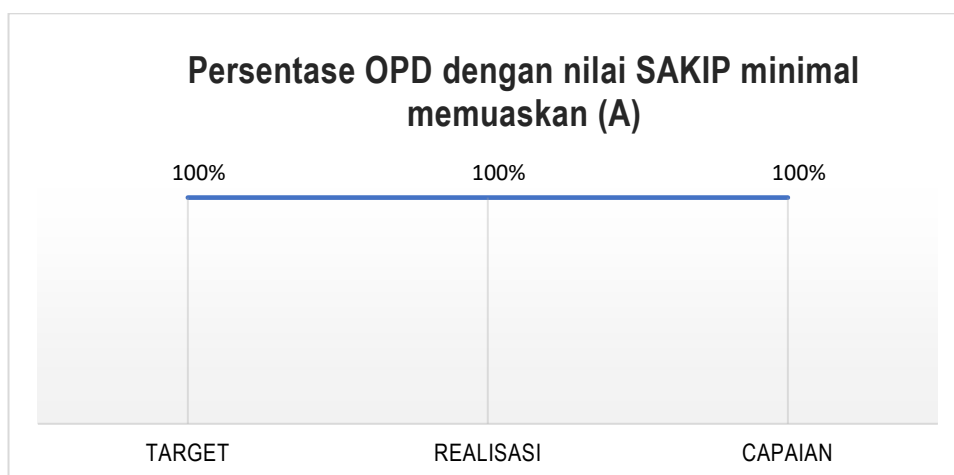
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah





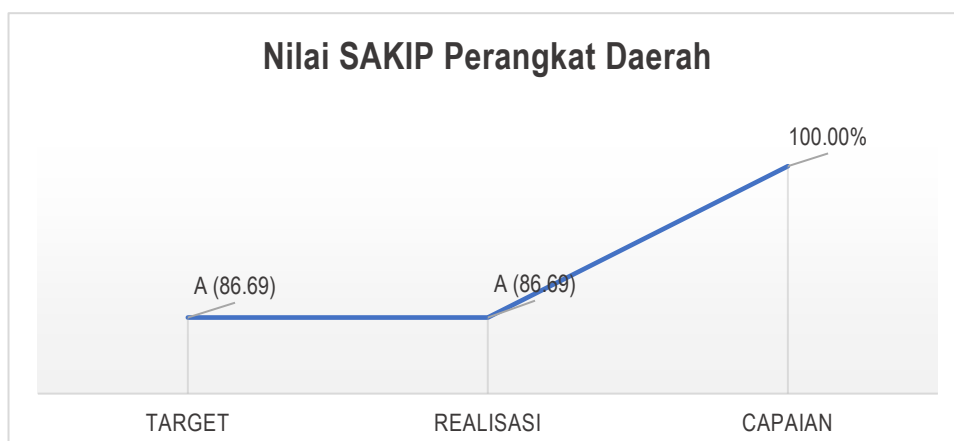
Kinerja Utama 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



Kinerja Utama 3:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2024 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	81,17%	100,21%	82%	85.05%	103,71%	83%	85,00%	102,41%
		Nilai Maturitas SPIP	NA	3,331 (Nilai)	NA	3,331 (Nilai)	3,199 (Nilai)	96,03%	3,332 (Nilai)	3,026 (Nilai)	90,82%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)	A (85,61)	100,76%	A (84,97)	A (85,60)	100,74%	A (86,69)	A (86,69)	100%

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Inspektorat daerah Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya serta terdapat indikator kinerja yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti pada Tahun 2023 adalah sebesar 85,50% sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 84,77%. Hal ini disebabkan antara lain karena masih terdapat beberapa Dokumen Tindak Lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi serta terdapat beberapa

OPD yang terlambat menindaklanjuti rekomendasi sehingga menjadi menumpuk di tahun berikutnya. Selain itu, Nilai Maturitas SPIP juga mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 3,199 sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,026. Hal ini dikarenakan manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi sd 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,00%	85,00%	100,00%
	Nilai Maturitas SPIP	3,334	3,026	90,76%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,50)	A (86,69)	101,34%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya pengendalian Internal Penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	84,77%	-	Tidak ada Target Secara Nasional

	Nilai Maturitas SPIP	3,026	-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	-	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	-	

Realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja nasional.

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	84,77%	94,93%
	Nilai Maturitas SPIP	3,026	3,286
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	N/A
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	B (61,15)

Realisasi sasaran strategis Meningkatkan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti pada

Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2024 adalah 84,77%, capaian ini terealisasi lebih rendah dibanding Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang memperoleh realisasi sebesar 94,93%. Lalu untuk indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP juga terealisasi lebih rendah dibanding Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang memperoleh realisasi sebesar 3,286. Lalu untuk sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2024 adalah A (86,69), capaian ini terealisasi lebih besar dibanding Inspektorat Kabupaten Blitar yang mendapat nilai B (61,15).

3.2 Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

Adapun kebijakan keuangan Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 berpedoman Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar 2022-2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2024 sebagaimana uraian tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Blitar mengalokasikan program/kegiatan dalam APBD 2024, Adapun Anggaran Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi :	Rp	10.098.992.316
2. Belanja Modal:	Rp	<u>69.410.000</u>
JUMLAH	Rp	10.168.402.316

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan alokasi dana selengkapannya terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.648.963.756,00	7.512.680.098,00	98,22
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	53.414.100,00	48.394.000,00	90,60

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.357.700,00	6.043.000,00	95,05
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.056.400,00	42.351.000,00	90,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.739.501.506,00	5.686.360.524,00	99,07
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.733.671.506,00	5.680.640.524,00	99,08
1.2.2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.590.000,00	1.560.000,00	98,11
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.240.000,00	4.160.000,00	98,11
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590.867.000,00	581.921.380,00	98,49
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.739.800,00	48.022.300,00	96,55
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	148.309.200,00	147.539.900,00	99,48
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	392.818.000,00	386.359.180,00	98,36
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.305.700,00	387.848.320,00	99,12
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.489.000,00	4.489.000,00	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.679.100,00	26.654.500,00	96,30
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.126.500,00	19.509.200,00	96,93
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.842.800,00	18.402.800,00	92,74
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.936.000,00	15.925.000,00	99,93
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.532.300,00	300.167.820,00	99,88
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.421.200,00	69.410.000,00	95,54
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.421.200,00	69.410.000,00	95,54
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	418.462.950,00	374.534.029,00	89,50
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	103.689.600,00	68.546.685,00	66,11
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.773.350,00	305.987.344,00	97,21
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	381.991.300,00	364.211.845,00	93,35

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pemerintah Daerah			
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.526.800,00	91.395.745,00	85,80
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	3.681.000,00	3.530.000,00	95,90
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.918.500,00	82.769.500,00	99,82
1.7.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.865.000,00	126.566.600,00	98,22
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.027.234.200,00	1.945.832.569,00	95,98
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.008.365.100,00	1.927.593.069,00	95,98
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	88.693.400,00	88.348.500,00	99,61
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55.426.800,00	54.995.990,00	99,22
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	209.442.600,00	209.025.000,00	99,80
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	88.484.500,00	87.426.000,00	98,80
2.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	1.545.400.800,00	1.467.437.379,00	94,45
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20.817.000,00	20.360.200,00	97,81
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18.869.100,00	18.239.500,00	96,69
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.420.000,00	7.280.000,00	98,11
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	11.449.100,00	10.959.500,00	95,72
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	724.150.700,00	709.889.649,00	98,03
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	17.985.000,00	17.069.300,00	94,91
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.710.000,00	7.794.300,00	89,49
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00
3.2	Pendampingan dan Asistensi	706.165.700,00	692.220.349,00	98,11
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8.098.200,00	7.531.000,00	93,00
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	229.581.300,00	227.017.049,00	98,88

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.2.3	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	386.915.200,00	380.100.300,00	98,24
3.2.3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	81.571.000,00	78.172.000,00	95,83
JUMLAH		10.400.348.656,00	10.168.402.316,00	97,77

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 10.168.402.316,00 dari total anggaran sebesar Rp 10.400.348.656,00 atau sebesar 97,77%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 termasuk tinggi.

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 10.400.348.656,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 10.326.927.456,00 (99,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 73.421.200,00 (0,70%). Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	% Anggaran
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rp 2.027.234.200,00	19,49%
	Nilai Maturitas SPIP		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Rp 724.150.700,00	6,96%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rp 7.648.963.756,00	73,55%%
TOTAL		Rp 10.400.348.656,00	

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran per Program

Program	Indikator Kinerja	Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Rp 2.027.234.200,00	19,49%
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)		
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp 724.150.700,00	6,96%
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)		
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Rp 7.648.963.756,00	73,55%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024

Tujuan/sasaran/Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran		
		Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83,00	%	85,00	%	102,41%	2.027.234.200,00	1.945.832.569,00	95,98%
	Nilai Maturitas SPIP	3,332	Nilai	3,026	Nilai	90,82%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	80,00	%	83,42	%	104,28%			
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	80,00	%	83,42	%	104,28%			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	89,00	%	92,07	%	103,45%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	89,00	%	92,07	%	103,45%			
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3	90,00	%	100	%	111,11%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1						105,31%	2.027.234.200,00	1.945.832.569,00	95,98%
Sasaran Strategis 2 :	Persentase PD	100	%	100	%	100%	724.150.700,00	709.889.649,00	98,03%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)								
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100%			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	30	PD	30	PD	100%			
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1	PD	4	PD	400%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2						200%	724.150.700,00	709.889.649,00	98,03%
Sasaran Strategis 3 :	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86,69)	Nilai	A (86,69)	Nilai	100%	7.648.963.756,00	7.241.399.896,00	98,22%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	84,50	Indeks	87,34	Indeks	103,36%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3						103,36%	7.648.963.756,00	7.512.680.098,00	98,22%

3. Efisiensi Sumber Daya Alam

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	102,41%	95,98%	1,00
	Nilai Maturitas SPIP	90,81%		
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	98,03%	1,02
Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00%	98,22%	1,02

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :

1. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,00 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,41% dan 90,81% (rata-rata tingkat capaian: 96,61%) hanya membutuhkan anggaran sebesar 95,98%. Hal ini dikarenakan pada indikator kinerja tersebut (terutama indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti) telah mencapai target kinerja.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan

efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% hanya membutuhkan anggaran sebesar 98,03%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% hanya membutuhkan anggaran sebesar 98,22%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

3.3 Prestasi/Penghargaan

Kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Kota Blitar kepada OPD telah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya:

1. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Pemerintah Kota Blitar memperoleh Peringkat 1 Kategori Pemerintah Kota se-Jawa Timur dan Peringkat 8 Kategori Pemerintah se-Indonesia Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

2. Opini BPK RI atas LKPD

Pemerintah Kota Blitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit BPK sebanyak 14 kali secara berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

3. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemda

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Blitar tahun 2013, 2014, 2015 meraih predikat CC, tahun 2016 meraih predikat B, tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 meraih predikat BB, serta pada tahun 2024 meraih kategori A atau Memuaskan dengan Nilai 80,06.

4. Pengendalian Inflasi Daerah

Pemerintah Kota Blitar memperoleh Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama. Penghargaan ini diterima dari 10

kab/kota di Jawa Timur dan 46 kab/kota se-Indonesia yang menerima penghargaan berdasarkan PMK No. 295 Tahun 2024)

5. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP OPD

Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2018 sampai dengan 2024 adalah Memuaskan (A) dengan Nilai 86,69.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah;

Indikator:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (83,00%) dengan realisasi 84,77%% menghasilkan capaian 102,13%%. Dari 832 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005 sampai dengan 2024) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 766 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2024) dari 4.468 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 3.727 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 102,13% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Salah satu faktor pendorong tercapainya indikator ini yaitu adanya kegiatan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI maupun Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui aplikasi SI-PATRIAWAS, sehingga proses penyelesaian Tindak Lanjut oleh OPD menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga dengan diadakannya Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP setiap semester yang diadakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar yang mempermudah OPD dalam hal pemutakhiran data dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

Faktor Penghambat:

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Selain itu terdapat beberapa OPD yang sering terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga proses penyelesaian tindak lanjut memerlukan waktu yang lebih lama.

Tindak Lanjut:

Untuk ke depannya akan terus memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP.

Nilai Maturitas SPIP.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,332 dengan realisasi sebesar 3,026 menghasilkan capaian sebesar 90,82%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Faktor Pendorong:

Perencanaan dan pencapaian tujuan organisasi sudah terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah serta manajemen resiko telah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Faktor Penghambat:

Aplikasi SPIP terintegrasi (E-Integrity) dari BPKP yang belum optimal sehingga menyulitkan proses Evaluasi Maturitas SPIP; manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Tindak Lanjut:

Berkoordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity serta mengoptimalkan pemantauan secara berkala penyelenggaraan manajemen risiko.

Sasaran 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Indikator:

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat

SANGAT BERHASIL.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi

(LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat yang berkesinambungan. Selain itu dengan adanya Aplikasi SI-VAKIP mempermudah tim evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dikarenakan dengan adanya aplikasi ini proses evaluasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif.

Faktor Penghambat:

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Tindak Lanjut:

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antar Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bappeda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

Sasaran 3:

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator:

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (86,69) dengan realisasi A (86,69) menghasilkan capaian 100%. Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700.1.2.9/751/410.050/2024.

Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

Faktor Penghambat:

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait penetapan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, pohon kinerja, crosscutting, dan lain sebagainya.

Tindak Lanjut:

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar 99,54% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Meskipun pencapaian target kinerja telah memuaskan, namun secara garis besar terdapat permasalahan yang mengiringi pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
- c. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

4.2 Langkah Perbaikan

Terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagai berikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.

- b. Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
- e. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- f. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.
- g. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
- h. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
- i. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder Inspektorat Kota Blitar, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Inspektorat Kota Blitar dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Blitar serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Blitar, 26 Februari 2025
Inspektur Daerah Kota Blitar

RATIH DEWI INDARTI SE, CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760225 200501 2009

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
	Unsur Pengawas an Urusan Pemerint ahan																	
	Inspekt or at Daerah					9.664.37 5.700,00		11.891.0 93.200		12.276.418. 100		12.610.045 .200		12.929.876. 300		59.371.808 .500		
	Tujuan 1 : Meningka tnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A		A(84,9 7)		A(84, 98)		A(84, 99)		A(85, 00)		A(85, 00)			
	Sasaran 1 : Meningka tnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A (84,96)		A(84,9 7)		A(84, 98)		A(84, 99)		A(85, 00)		A(85, 00)			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 1	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	Inde ks	83,50	6.402.12 6.000	B(84)	8.018.95 1.600	B(84. 5)	8.204.604.2 00	B(85, 00)	8.324.561. 900	B(85. 50)	8.425.121.2 00	B(85. 50)	39.375.364 .900	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/J umlahDok umen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	%	100,00	60.796.7 00	100,00	79.070.1 86	100,0 0	83.023.695	100,0 0	136.329.31 7	100,0 0	142.145.733	100,0 0	440.568.93 1	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun	Doku men	26,00	5.863.70 0	9	9.990.31 0	9	10.489.826	9	11.014.316 ,78	9	11.565.033	36	43.059.485		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 1 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	Laporan	35,00	54.933.000	7,00	69.079.876	7,00	72.533.870	7,00	125.315.000	7,00	130.580.700	28,00	397.509.446		
6 0 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/ Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x 100%	%	100,00	5.409.212.600	100,00	6.319.599.006	100,00	6.331.464.631	100,00	6.403.340.493	100,00	6.568.338.818	100,00	25.622.742.948	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	Orang/Bulan	37,00	5.409.212.600	37,00	6.298.210.398	37,00	6.309.006.592,90	37,00	6.379.759.553	37,00	6.543.578.830,17	37,00	25.530.555.374		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 0 2	0 1 1 0 0 2	0 0 0 0 0 6	Pengelola an dan Penyiapa n Bahan Tanggapa n dan Pemeriks aan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n pada tahun n	Doku men	-	-	250,00	9.634.35 0	250,0 0	10.116.067, 50	250,0 0	10.621.871	250,0 0	11.152.964, 42	1000, 00	41.525.253	
6 0 1 0 0 2	0 1 1 0 0 2	0 0 0 0 0 7	Koordina si dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD pada Tahun n	Lapo ran	-	-	18,00	11.754.2 58	18,00	12.341.970, 90	18,00	12.959.069	18,00	13.607.022, 92	72,00	50.662.321	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar/J umlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x10 0%	%	100,00	304.108. 000	100,00	395.245. 328	100,0 0	415.007.594	100,0 0	435.757.97 4	100,0 0	457.545.873	100,0 0	1.703.556. 769	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada tahun n	Paket	2,00	35.285.2 00	2,00	52.875.0 00	2,00	55.518.750	2,00	58.294.688	2,00	61.209.422	8,00	227.897.85 9		
6 0 1 0 2 0 5	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun n	Orang		14.944.8 00	47,00	112.310. 328	47,00	117.925.844 ,40	47,00	123.822.13 7	47,00	130.013.243 ,45	47,00	484.071.55 2		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 1 5	Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undanga n	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan pada tahun n	Oran g	100,00	253.878. 000	37,00	230.060. 000	37,00	241.563.000	37,00	253.641.15 0	37,00	266.323.207 ,50	37,00	991.587.35 8		
6 0 1 0 1 6	Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaa n administra si umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersedia an Adminstras i Umum Perangkat Daerah sesuai standart/J umlah Ketersedia an Administra si UmumPera ngkat Daerah)x10 0%	%	100,00	362.825. 000	100,00	299.286. 464	100,0 0	314.250.787	100,0 0	329.963.32 7	100,0 0	346.461.493	100,0 0	1.289.962. 071	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 1 6	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Pake t	6,00	3.992.10 0	1,00	4.164.57 9	1,00	4.372.807,9 5	1,00	4.591.448	1,00	4.821.020,7 6	4,00	17.949.856		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
										2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Pake t	21,00	58.860.900	3,00	30.010.021	3,00	31.510.522,05	3,00	33.086.048	3,00	34.740.350,56	12,00	129.346.942		
6	0	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun n	Pake t	24,00	13.695.800	3,00	16.318.594	3,00	17.134.523,70	3,00	17.991.250	3,00	18.890.812,38	12,00	70.335.180		
6	0	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	Pake t		53.745.200	12,00	25.241.000	12,00	26.503.050,00	12,00	27.828.203	12,00	29.219.612,63	48,00	108.791.865		
6	0	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	Pake t		16.478.000	1,00	16.719.270	1,00	17.555.233,50	1,00	18.432.995	1,00	19.354.644,93	4,00	72.062.144		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI				
									2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1					2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12		
6	0	1	0	2	0	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undanga n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan pada tahun n	Doku men		6.620.00 0	24,00	5.400.00 0	24,00	5.670.000,0 0	24,00	5.953.500	24,00	6.251.175,0 0	96,00	23.274.675			
6	0	1	0	2	0	Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun n	Lapo ran		209.433. 000	6,00	201.433. 000	20,00	211.504.650 ,00	20,00	222.079.88 3	20,00	233.183.876 ,63	66,00	868.201.40 9			
6	0	1	0	2	0	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan /Pengadaa n BMD penunjang urusan)x10 0%	%		-	100,00	283.097. 156	100,0 0	297.252.014	100,0 0	462.114.61 4	100,0 0	327.720.345	100,0 0	1.370.184. 130	Sekretaris	Kota Blitar	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	
6 0 1 0 0 7	0 1 1 0 0 2	Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasion al yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasion al yang tersedia pada tahun n	Unit	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	150.000.00 0	0,00	-	1,00	150.000.00 0		
6 0 1 0 0 7	0 1 1 0 0 5	Pengadaa n Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun N	Unit	-	-	5,00	77.104.5 84	5,00	80.959.813, 20	5,00	85.007.804	5,00	89.258.194, 05	20,00	332.330.39 5		
6 0 1 0 0 7	0 1 1 0 0 6	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	-	-	21,00	150.992. 572	21,00	158.542.200 ,60	21,00	166.469.31 1	21,00	174.792.776 ,16	84,00	650.796.85 9		
6 0 1 0 0 7	0 1 1 0 0 7	Pengadaa n Aset Tetap Lainnya	Tersediany a Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	-	-	1,00	5.000.00 0	1,00	5.250.000,0 0	1,00	5.512.500	1,00	5.788.125,0 0	4,00	21.550.625		
6 0 1 0 0 7	0 1 1 0 0 8	Pengadaa n Aset Tak Berwujud	Tersediany a Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun n	Unit	-	-	1,00	50.000.0 00	1,00	52.500.000, 00	1,00	55.125.000	1,00	57.881.250, 00	4,00	215.506.25 0		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/J umlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x1 00%	%	100,00	83.728.5 00	100,00	393.778. 260	100,0 0	413.467.173	100,0 0	189.401.00 0	100,0 0	198.871.000	100,0 0	1.195.517. 433	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	Lapo ran	4,00	83.728.5 00	36,00	88.863.0 00	36,00	93.306.150	36,00	94.700.500	36,00	99.435.500	144,0 0	376.305.15 0		
6 0 1 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	Lapo ran	-	-	13,00	304.915. 260	13,00	320.161.023	13,00	94.700.500	13,00	99.435.500	52,00	819.212.28 3		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/J umlah Barang Milik Daerah)x10 0%	%	100,00	181.455. 200	100,00	248.875. 200	100,0 0	350.138.305	100,0 0	367.655.17 5	100,0 0	384.037.939	100,0 0	1.350.706. 619	Sekretaris	Kota Blitar
6 0 1 0 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya atau Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya pada tahun n	Unit		53.304.0 00	17,00	56.169.1 00	17,00	58.977.555	17,00	62.837.709 ,75	17,00	67.425.989	17,00	245.410.35 4		
6 0 1 0 1 0 9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	Unit	-	-	5,00	5.169.00 0	5,00	5.427.450	5,00	5.698.822, 50	5,00	5.983.764	20,00	22.279.036		
6 0 1 0 1 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Unit	-	-	20,00	21.000.0 00	20,00	22.050.000	20,00	23.152.500 ,00	20,00	24.310.125	80,00	90.512.625		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 0 9	0 1 1 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	1,00	3.000.000	1,00	3.150.000	1,00	3.307.500,00	1,00	3.472.875	4,00	12.930.375		
6 0 1 0 0 9	0 1 1 0 0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	2,00	20.000.000	2,00	21.000.000	2,00	22.050.000,00	2,00	23.152.500	8,00	86.202.500		
6 0 1 0 0 9	0 1 1 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	Unit	1,00	91.790.000	2,00	110.280.000	2,00	115.794.000	2,00	121.583.700,00	2,00	127.662.885	8,00	475.320.585		
6 0 1 0 0 9	0 1 1 0 0 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	Unit	20,00	36.361.200	1	33.257.100	1	123.739.300	1	129.024.943	1	132.029.801,00	4	418.051.144		
		Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
	dan aset daerah																	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/ Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	%	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00	-		
		Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	Nilai	-		-		LEVE L 3(3,3 32)		LEVE L 3(3,3 33)		LEVE L 3(3,3 34)		LEVE L 3(3,3 35)			
6	0102	PROGR M PENYELE NGGARA AN PENGAW ASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	72,50	2.510.67 7.900	75,00	2.951.76 8.400	80,00	3.100.457.0 00	82,50	3.255.558. 600	85,00	3.425.334.0 00	85,00	15.243.795 .900	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklan juti pada wilayah 2)x100%	%	72,50		75,00		80,00		82,50		85,00		85,00			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklan juti pada wilayah 1)x100%	%	86,00		87,00		89,00		90,00		92,50		92,50			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklan juti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklan juti pada	%	86,00		87,00		89,00		90,00		92,50		92,50			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI				
										2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1						2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12		
								wilayah 2)x100%																	
								Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) /Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100 %	%	80,00		90,00		90,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0				
6	0 1	0 2	1 . 0 1		Penyeleng garaan Pengawas an Internal	Persentase rekomenda si hasil audit BPK yang ditindaklan juti	(Jumlah rekomenda si hasil audit BPK yang ditindaklan juti/Jumla h rekomenda si hasil audit BPK yang ditindaklan juti)x100%		%	90,00	2.435.94 1.800	90,00	2.889.55 5.690	90,00	3.035.133.6 55	90,00	3.186.969. 087	90,00	3.353.315.0 12	90,00	12.464.973 .443	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)x100%	%	87,50		87,50		87,50		87,50		87,50		87,50			
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu/Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah)x100%	%	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00			
		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraan SPIP nya/Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggaraan SPIP)x100%	PD	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
										2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1	0	0	Pengawas an Kinerja Pemerint ah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun n	Lapo ran	30,00	191.802. 400	30,00	155.348. 100	30,00	163.115.505 ,00	30,00	171.350.03 0	30,00	179.917.531 ,76	120,0 0	669.731.16 7		
6	0	0	1	0	0	Pengawas an Keuangan Pemerint ah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun n	Lapo ran	40,00	92.704.5 00	40,00	84.716.4 63	40,00	88.952.286, 15	40,00	93.399.900	40,00	98.069.895, 48	160,0 0	365.138.54 5		
6	0	0	1	0	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada tahun n	Lapo ran	30,00	214.896. 500	30,00	670.892. 900	30,00	704.437.545 ,00	30,00	739.659.42 2	30,00	783.639.863 ,36	120,0 0	2.898.629. 731		
6	0	0	1	0	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada tahun n	Lapo ran	50,00	231.745. 300	50,00	134.488. 503	50,00	142.313.108 ,15	50,00	149.428.76 4	50,00	156.900.201 ,74	200,0 0	583.130.57 6		
6	0	0	1	0	0	Kerjasam a Pengawas an Internal	Jumlah Kesepakata n Pengawasa n Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakata n Pengawasa n Internal yang Terbentuk pada tahun n	Kese paka tan		1.578.65 1.200	3,00	1.662.56 4.324	3,00	1.745.692.5 40,20	3,00	1.832.977. 167	3,00	1.924.626.0 25,57	12,00	7.165.860. 057		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 0 1	0 2 0 0 7	Monitorin g dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP	Doku men		126.141. 900	4,00	181.545. 400	4,00	190.622.670 ,00	4,00	200.153.80 4	4,00	210.161.493 ,68	16,00	782.483.36 7		
6 0 1 0 0 2	0 2 0 0 2	Penyeleng garaan Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaa n dengan tujuan tertentu (PDTT)	%	100,00	74.736.1 00	100,00	62.212.7 10	100,0 0	65.323.346	100,0 0	68.589.513	100,0 0	72.018.988	100,0 0	268.144.55 7	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6 0 1 0 0 2	0 2 0 0 1	Penangan an Penyelesa ian Kerugian negara/d aerah	Jumlah Laporan Penyelesaia n Kerugian Negara/Da erah yang Ditangani	Lapo ran	2,00	16.831.9 00	2,00	30.255.6 66	2,00	31.768.449, 30	2,00	33.356.872	2,00	35.024.715, 35	8,00	130.405.70 2		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 0 2 0 0 2	Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun	Lapo ran	2,00	57.904.2 00	2,00	31.957.0 44	12,00	33.554.896, 20	12,00	35.232.641	12,00	36.994.273, 06	38,00	137.738.85 4		
	Tujuan 3 : Meningka tnya akuntabil itas kinerja pemerint ahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	Nilai	BB (72,15)		BB (72,20)		BB (72,2 5)		BB (72,3 0)		BB (72,3 5)		BB (72,3 5)			
	Sasaran 3 : Meningka tnya akuntabil itas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaska n (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaska n (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi) x100%	%	100,00		100,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0			
6 0 1 0 3	PERUMU SAN KEBIJAK AN, PENDAM PINGAN DAN ASISTEN SI	Persentase pengaduan masyaraka t yang ditindaklan juti	(Jumlah Pengaduan Masyaraka t yang ditindaklan juti/Jumla h Pengaduan Masyaraka t)x100%	%	100,00		100,00	920.373. 200	100,0 0	971.356.900	100,0 0	1.029.924. 700	100,0 0	1.079.421.1 00	100,0 0	4.752.647. 700	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
										2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaska n (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaska n (A) pada tahun n	PD	29,00		29,00		29,00		29,00		29,00		29,00				
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	PD	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
6	0 1	0 3	1 . 0 0 1		Perumus an Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an Dan Fasilitasi Pengawas an	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	Doku men	4,00	75.651.9 00	4,00	73.153.2 39	4,00	76.810.900, 95	4,00	80.651.446	4,00	84.684.018	16,00	315.299.60 4	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar	
6	0 1	0 3	1 . 0 0 1	0 0 0 1	Perumus an Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an	Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n yang Disusun	Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n yang Disusun pada tahun n	Reko men dasi	4,00	75.651.9 00	4,00	15.263.0 16	4,00	16.026.166, 80	4,00	16.827.475	4,00	17.668.848, 90	16,00	65.785.507			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 3 1 0 0 1 2	Perumus an Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawas an	Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasa n yang Disusun	Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasa n yang Disusun pada tahun	Reko men dasi	0	-	4,00	57.890 .223	4,00	60.784.734, 15	4,00	63.823.971	4,00	67.015.169, 40	16,00	249.514.09 7		
6 0 1 3 1 0 2	Pendampi ngan dan Asistensi	Persentase kasus/pen gaduan masyaraka t yang dapat diselesaika n	(Jumlah Kasus/Pen gaduan masyaraka t yang dapat diselesaika n/Jumlah Kasus/Pen gaduan)x1 00%	%	100,00	675.919. 900	100,00	847.219. 961	100,0 0	894.545.999	100,0 0	949.273.25 4	100,0 0	994.737.082	100,0 0	3.685.776. 296	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Ju mlah Perangkat Daerah)x10 0%	%	100,00		100,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,0 0			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
										2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	PD	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		16,00				
6	0 1	0 3	1 . 0 2	0 0 1	Pendampi ngan dan Asistensi Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah pada tahun n	Pera ngka t Daer ah		10.822.2 00	29,00	69.101.2 25	30,00	77.521.326	30,00	91.397.347 ,56	30,00	93.967.380	30,00	331.987.27 9			
6	0 1	0 3	1 . 0 2	0 0 2	Pendampi ngan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	Pera ngka t Daer ah		95.261.0 00	10,00	105.100. 000	10,00	110.355.000	10,00	115.872.75 0,00	10,00	121.666.388	10,00	452.994.13 8			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOK ASI
					2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	2	4	5					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6 0 1 3 1 0 0 2 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun	Kegiatan		61.564.300	16,00	88.029.867	16,00	92.431.360	16,00	97.052.928,37	16,00	101.905.575	64,00	379.419.731		
6 0 1 3 1 0 0 2 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun	Perangkat Daerah		508.272.400	6,00	584.988.869	6,00	614.238.312	6,00	644.950.228,07	6,00	677.197.739	24,00	2.521.375.149		

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2024

Tujuan : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 * Indikator : Nilai Sakip
 * Target : BB (72,25)
 : 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
 * Indikator : Opini BPK atas LKPD
 * Target : WTP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	80.00%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90.00%	2.008.365.100,00
	Nilai Maturitas SPIP	3,332 Nilai		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	80.00%		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.50%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	89.00%		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70.00%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	89.00%		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	90.00%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	30 laporan	88.693.400,00
						Pengawasan Keuangan Pemerintah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	40 laporan	55.426.800,00
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	30 laporan	209.442.600,00
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	50 laporan	88.484.500,00
						Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 kesepakatan	1.545.400.800,00
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 dokumen	20.817.000,00
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	18.869.100,00
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	30 OPD		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 laporan	
				Persentase Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 laporan	
						Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 dokumen	17.985.000,00
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 PD	706.165.700,00
							Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 PD	8.098.200,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

						Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	229.581.300,00
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 kegiatan	386.915.200,00
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6perangkat daerah	81.571.000,00
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,98)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	84,50	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	53.414.100,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 dokumen	6,357,700
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7 laporan	47,056,400
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	5.739.501.506,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	5.733.671.506,00
						Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 dokumen	1.590.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	4.240.000,00
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	590.867.000,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	148.309.200,00
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 orang	392.818.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	49.739.800,00
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	391.305.700,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.489.000,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	27.679.100,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	20.126.500,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	19.842.800,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.936.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24 dokumen	2.700.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	300.532.300,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	73.421.200,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	73.421.200,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	418.462.950,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	103.689.600,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	314.773.350,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	381.991.300,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	106.526.800,00
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	3.681.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	82.918.500,00
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	50.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	128.865.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104 unit	10.000.000,00



LAMPIRAN 3

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kota Blitar

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Wali Kota Blitar

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan penacapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


 Wali Kota Blitar
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
 Plt. Inspektur Daerah Kota Blitar

RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP.19760225 200501 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR**

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%
		Nilai Maturitas SPIP	3,332 (Nilai)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.648.963.756,00	DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2.027.234.200,00	DAU
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 724.150.700,00	DAU
JUMLAH		10.400.348.656,00	


 Wali Kota Blitar
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024


 Pjt. Inspektur Daerah Kota Blitar
RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP.19760225 200501 2 009

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN								Capaian	KET	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	TRIWULAN								KET
				REALISASI I	% I	REALISASI II	% II	REALISASI III	% III	REALISASI IV	% IV					REALISASI I	% I	REALISASI II	% II	REALISASI III	% III	REALISASI IV	% IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti Nilai Maturitas SPIP	83%	78.73%	94.86%	83.07%	100.08%	90.02%	108.46%	84.77%	102.13%	102.13%		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,027,234,200.00	146,710,000.00	7.24%	205,363,000.00	10.13%	423,403,016.00	20.89%	1,170,356,553.00	57.73%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal	100%	0.00%	0%	0.00%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	724,150,700.00	190,298,399.00	26.28%	55,093,900.00	7.61%	101,461,200.00	14.01%	345,366,850.00	47.69%	
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86.69)	0.00	0%	0.00	0%	86.69%	100%	0%	0%	100.00%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,648,963,756.00	1,376,499,747.00	18.00%	2,283,988,342.00	29.86%	1,522,858,463.00	19.91%	2,329,333,546.00	30.45%	

Permasalahan : Keterlambatan Realisasi Anggaran
 Faktor Pendukung : 1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah
 2. Dokumen Pendukung yang Lengkap
 Faktor Penghambat : Pengumpulan data dari OPD memerlukan waktu yang lama
 Data yang dikumpulkan oleh audit kurang sesuai
 Terdapat mandatory yang diluar PKPT
 Pemantauan terhadap kendala yang dihadapi tidak rutin dilakukan
 Tindak Lanjut : Perlu adanya koordinasi yang rutin dengan pihak

Blitar, 2 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Blitar

RATIH DEWI INDARTI, SE., CGCAE
 NIP. 19760225 200501 2 009